

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha (pedagang) yang menjajakan makanan, barang atau jasa dengan usaha bergerak maupun tidak bergerak (Sinambela, P. et al, 2018). PKL biasanya menggelar dagangan atau gerobaknya di area pinggir perlintasan jalan raya dan emperan toko, dan juga kebanyakan memilih berjualan di tempat keramaian seperti di pasar, tempat wisata, stasiun bus dan kereta atau halte-halte (Safitri, Eva Nirmala Oky & Hendra Sukmana, 2020).

PKL juga merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian kota karena terbukti mampu memberikan dukungan kepada masyarakat luas, terutama kelompok kurang mampu melalui penyediaan produk-produk murah dan terjangkau. Hal tersebut termasuk dalam perdagangan eceran.

Menurut data BPS Kota Ternate selama lima tahun terakhir penyumbang terbesar pertama pada perekonomian Kota Ternate adalah perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar kurang lebih sekitar 25% (dua puluh lima persen). Pada tahun 2022, kontribusi kategori ini mencapai 3,06 triliun rupiah atau sekitar 24,94% (dua puluh empat koma sembilan puluh empat persen). Dari nilai tersebut, sekitar 94,83% (sembilan puluh empat koma delapan puluh tiga persen) merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan besar dan eceran, sedangkan 5,17% (lima koma tujuh belas persen) merupakan sumbangan dari sub kategori perdagangan mobil, sepeda motor dan repasinya. Hal ini memperlihatkan bahwa peran perdagangan besar dan eceran sangat besar untuk kontribusi perekonomian daerah.

PKL dianggap menjadi bagian dari problematika perkotaan terutama terkait dengan ruang publik, tata kota, dan estetika ruang kota. PKL cenderung tidak mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan pengguna dengan aktivitas lain di ruang yang sama. Akibatnya ruas jalan semakin sempit, pejalan kaki yang tidak memiliki ruang dan kemacetan pun tidak dapat dihindari. Dengan demikian

dibuktikan pada media Halmahera Raya edisi tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Ternate) memberikan teguran terhadap PKL yang berjualan di badan jalan, di Kelurahan Gamalama. Pasalnya, mengganggu kelancaran lalu lintas di area tersebut. Selanjutnya pada media Tanda seru edisi tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Ternate) menertibkan sejumlah PKL di Kelurahan Santiong, tepatnya di belakang Benteng Oranje. Penertiban dilakukan agar para pedagang ini tak menggunakan badan jalan untuk berjualan dan masuk ke pasar. Kepala Satpol PP Ternate Fhandi Tumina menyatakan, di kawasan tersebut ditemukan satu penjual ikan hias, satu penjual nasi kuning, dan pedagang umbul-umbul. Sementara pada laman media Tandaseru edisi tahun 2022 juga, PKL yang berjualan aneka gorengan di sepanjang jalan Pahlawan Revolusi, Taman Pantai Falajawa, Kelurahan Muhajirin, Kota Ternate, Maluku Utara, terkena operasi penertiban Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate. PKL yang rata-rata berjualan dengan gerobak dorong, itu dilarang oleh petugas Satpol PP agar tidak lagi menjajakan jualannya di tempat tersebut. Salah satu PKL bernama Mujiono, mengeluhkan kebijakan Pemerintah Kota Ternate ini. Sebab bukannya tidak mendukung, namun menurut Mujiono jika dilakukan penertiban maka setidaknya pemerintah juga harus memberikan solusi. Selain itu pada media wartatidore.com edisi tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP Kota Ternate) sedang melakukan penertiban terhadap PKL yang menggunakan bahu jalan dan trotoar di berbagai titik ramai sebagai tempat berjualan.

Kondisi PKL di Kota Ternate memerlukan perhatian dalam hal penyediaan lokasi yang strategis. Penyediaan lokasi yang strategis terhadap PKL menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk menata keberadaan PKL dengan melalui penyediaan Pusat PKL. Menyatukan setiap PKL dalam satu pusat ini dapat menyelesaikan permasalahan PKL yang tidak beraturan sehingga dapat menciptakan tata Kota Ternate ke arah yang lebih baik.

Penyediaan pusat PKL, perlu untuk mempertimbangkan dengan perilaku PKL selaku pengguna utama. Hal ini dikarenakan, penyediaannya harus dapat memberikan kebutuhan secara fungsional, rasional, ekonomis, dan juga

mengakomodasi kebutuhan ekspresi emosionalnya yaitu sosialisasi dengan sesama terhadap pengguna lainnya agar dapat menarik minat PKL untuk menjadi bagian dari pengguna. Arsitektur perilaku merupakan salah satu pendekatan arsitektur yang relevan dengan isu tersebut yaitu untuk menyelidiki hubungan perilaku manusia dengan lingkungan sebagai penerapan desain dan kebutuhan penggunaannya. Melalui pendekatan ini, Pusat PKL dapat meminimalisir kegagalan dalam hal minat PKL untuk menjadi pengguna utama ruang Pusat PKL.

Pusat PKL sendiri merupakan ruang komersil yang dapat mewadahi kegiatan usaha dagang para PKL, dengan begitu dagangannya menjadi lebih terjamin dan layak. “Perancangan Pusat Pedagang Kaki Lima di Kota Ternate dengan Pendekatan Arsitektur Perilaku” menjadi alternatif sebagai wadah yang dapat memberdayakan keberadaan PKL di Kota Ternate untuk menopang ekonomi daerah sehingga keberadaannya menjadi legal secara hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancangan Pusat Pedagang Kaki Lima yang dapat mewadahi aktifitas PKL dengan memenuhi kebutuhan kegiatan usahanya di Kota Ternate?
2. Bagaimana menerapkan pendekatan Arsitektur Perilaku dalam Perancangan Pusat Pedagang Kaki Lima?

1.3. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dan manfaat dari perancangan pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate adalah sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan pusat pedagang kaki lima yaitu:

1. Untuk menghasilkan rancangan Pusat Pedagang Kaki Lima yang dapat mewadahi aktifitas PKL dengan memenuhi kebutuhan kegiatan usahanya di Kota Ternate.
2. Untuk menciptakan penerapan pendekatan arsitektur perilaku dalam perancangan pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate.

1.3.2. Manfaat Perancangan

Perancangan pusat pedagang kaki lima memiliki beberapa manfaat yang dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan kota, pemerintah, PKL dan masyarakat yaitu:

1. Manfaat bagi Pemerintah

Dapat mengatasi problematika PKL dengan maksimal dan sebagai fungsi ekonomi, yaitu dapat meningkatkan perekonomian daerah.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Dapat memudahkan masyarakat dalam peningkatan lapangan kerja.

3. Manfaat bagi Pendidikan.

Sebagai referensi dalam perancangan pusat pedagang kaki lima dengan pendekatan arsitektur yang menyelidiki hubungan perilaku manusia dengan lingkungan.

1.4. Ruang Lingkup Perancangan

Ruang lingkup perancangan merupakan pembahasan terhadap batasan objek, batasan desain, dan pengguna dari perancangan pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate.

1.4.1. Batasan Objek

Objek perancangan yaitu pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate ini bertujuan untuk mewadahi para pedagang kaki lima. Melalui perancangan ini pedagang kaki lima tersebut mendapatkan fasilitas berupa:

1. Fasilitas utama

a. Kuliner (siap saji)

1) Makanan berat

2) Jajanan

b. Buah

c. Pakaian

d. Aksesoris

e. Jasa

Servis barang (sepatu, jam, kerajinan, dan lain-lain)

2. Kantor pengelola
3. *Workshop* kerajinan
4. Fasilitas sosial
5. Fasilitas penunjang lainnya

1.4.2. Batasan Desain

Desain arsitektur ruang lingkup perancangan juga mencakup desain arsitektur pusat pedagang kaki lima secara keseluruhan dengan arsitektur perilaku ini termasuk pemilihan arsitektur yang mengutamakan keselarasan antara perilaku manusia dengan lingkungan.

1.4.3. Pengguna

Pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate ini ditujukan untuk pedagang kaki lima permanen (menggunakan lapak/kios), semi permanen (menggunakan gerobak), pengelola dan masyarakat umum (pengunjung).

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk judul perancangan pusat pedagang kaki lima di Kota Ternate di bagi menjadi beberapa bagian, di antaranya sebagai berikut:

BAB 1: Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang objek, rumusan masalah tujuan dan manfaat perancangan, ruang lingkup perancangan dan sistematika penulisan, dan disusun secara sistematis.

BAB 2: Tinjauan Teori

Menguraikan pengertian objek rancangan, penggunaan literatur dan teori arsitektur secara umum, serta studi komparasi.

BAB 3: Metode Perancangan

Menguraikan tahapan dalam proses penelitian untuk menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

BAB 4: Tinjauan Objek Perancangan

Menguraikan tentang tinjauan lokasi perancangan dan tinjauan khusus objek rancangan.

BAB 5: Analisa dan Konsep Perancangan

Menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan konsep yang sesuai dengan tujuan Perancangan.

BAB 6: Penutup

Berisi kesimpulan dan saran.